

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, ctk. Keempat, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012.

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

A. Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum Demokrasi dan Pertanahan*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Achmad Sodiki, Yanis Maladi., *Politik Hukum Agraria* , Mahkota Kata, cetakan pertama, 2009.

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007.

Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Amiruddin & Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Cet. ke-3, CV. Mandar Maju Bandung , 2006.

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta, 2005.

Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Kencana, Jakarta, 2003.

A.P.Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

-----, *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*, Cet. ke-10, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 3, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.

-----, *Hukum Agraria Naional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.

-----, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka. 2014.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djembatan, Jakarta, 2003.

-----, *Hukum Agraia Indonesia*, Penerbit Djambatan, cetakan kesepuluh, Jakarta, 2005.

-----, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet. ke-1*, Universitas Trisakti, , Jakarta, 2007.

-----, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksananya*, Djambatan, t. t.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta,1996.

Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Fisafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, Teroka Riau, Vol. VIII, No. 2, 2008.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Diah, M. Siregar, J. Dakung. S, *Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1986.

Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

DR. Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Efendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

George Sabine, *A History of Political Theory*, George G.Harrap & CO.Ltd., London, 1995.

Gunanegara, rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cet. Pertama, Tata Nusa, Jakarta, 2008.

Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Hayati, Sri, *Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitanya Dengan Investasi*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Imam Sutiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University press, cetakan ketiga, Yogyakarta, 1990.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005.

Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan, Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL), Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.

Jarot Widya Muliawan, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, Edisi Revisi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2015.

Jhon Salendeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria, *Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria, Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat atas Sumber Agraria*.

Kumpulan tulisan dalam rangka memperingati 60 th Prof. Arie Sukanti Hutagalung, *Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (suatu pendekatan multidisipliner)*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2011.

Liliz Nur Faizah, *Hak Menguasai Negara Suatu Pendekatan Historis-Filosofis*, (rangkuman dari Bab II tentang Hak Menguasai Negara, dalam skripsi "Perkembangan Konsep Kepentingan Umum dalam Hukum Pengambilalihan Hak atas Tanah di Indonesia (1960-2006)" di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada tahun 2007.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Xxx*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Maria Rita Ruwiasuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Press KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. t. t.

Maria S.W.Sumardjono, *Puspita Serangkum: Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.

-----, *Tanah Dalam Prefektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Bukum Kompas, Jakarta, 2008.

Maria Sriwulani Sumardjono, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Penguasaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 14 Februari 1998.

Maria Rita Ruwiasuti, , *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Press KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 113.

Miftah Thoha, *Perspektif Pelaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jilid II)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Misdayanti dan Kartaspoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. ke-6, PT. Alumni, Bandung , 2006.

Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Kerjasama PKHKD FH UNSOED dengan UII Press, Yogyakarta, 2006.

Muhammad Yamin, , Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Cetakan I, 2008.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.

Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. bina Ilmu, Surabaya, 1989.

-----, *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.

-----, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

-----, *Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum, Pidato pengukuhan Guru Besar FHUI*, Jakarta, 17 November 1979.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Profil daerah kabupaten dan kota. Penerbit Buku Kompas. 2001.

Registrasi Penduduk Kota Pekanbaru 2011.

Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Republica, Volume 5 Nomor 2, 2006.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.

Samin, S.M. *Dari kebatinan senapelan ke Bandaraya Pekanbaru: menelisik jejak sejarah Kota Pekanbaru, 1784-2005*. Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Riau dan Penerbit Alaf Riau. 2006.

Sarundajang, *Arus balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 2000.

S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1980.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekanto & Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Sri Hayati, *Pengaturan Hak atas Tanah dalam Kaitannya dengan Investasi*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1992.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. ke-1, Edisi ke II Liberty, Yogyakarta, 1988.

-----, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law itu?*, PT. Alumni, Bandung, 1982.

-----, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudjarwo Marsoem dkk, *Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah*, Renebook, Jakarta, 2015.

Suhariningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet. ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Syafruddin Kalo, *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi*, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, t.t.

Tim Pusat Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 2008.

Thamrin S, *Metode Penelitian, Sari Kuliah*, Pekanbaru, 1996.

Umar Kusumo Haryono, *Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No. 5 / 1960, Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006*.

Yalid, *Peranan Perencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2003.

Peraturan:

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia" Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia". Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Surat Keputusan Riau Nomor: KPTS.297/III/2011 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.312/XI/1982 Tentang Pencadangan Areal Tanah Di Kelurahan Simpang Tiga Dan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006.

Bappeda Provinsi Riau, 2012.

Internet:

<http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan/mirip>

<http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan/mirip>

<http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-kepala-daerah-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>

<http://kbbi.web.id/kasus>

<http://www.arti-definisi.com/Areal>

<http://www.artikata.web.id/pencadangan.html>

<http://kamusbahasaindonesia.org/pengembangan/mirip>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Udara

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

Sejarah Daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan](#), 1977.

[Sejarah Pekanbaru](#)". Pemda kota Pekanbaru.

<http://riautekini.com/sosial.php?arr=66572>

<https://amp.kaskus.co.id/thread/52833937fbca17655b00000a/warga-dua-rw-tolak-perluasan-kawasan-pecadangan-lanud-pekanbaru>,

<http://riautekini.com/sosial.php?arr=66572>,

<https://amp.kaskus.co.id/thread/52833937fbca17655b00000a/warga-dua-rw-tolak-perluasan-kawasan-pecadangan-lanud-pekanbaru>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran,-instruksi,-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia>,

<http://riautekini.com/sosial.php?arr=66572>

<http://rohionline.com/berita/detail/4178/2013/11/14/patok-perluasan-lahan-cadangan-auri-ditolak-warga#.WEQpuLJ97IU>,

<http://mediacenter.riau.go.id/read/13034/tim-inventarisir-konflik-lahan-pencadangan-tn.html>,

<http://riaupos.co/70854-arsip-pencadangan-tanah-tni-au-diinventarisir.html#ixzz4Rsq7vR2L>.

<http://harian.analisadaily.com/riau/news/pengembangan-bandara-pekanbaru-terkendala-kepentingan-militer/248271/2016/07/03>